

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI PENDIDIKAN DASAR: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN HASIL

SUPARMAN¹, MUHAMMAD²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mataram

¹suparman.gs.pd.sd@gmail.com, ²muhammad@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 1). Konsep Merdeka Belajar yang diambil dari pendapat para ahli yang diambil dari referensi yang relevan, 2). Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek, 3). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar sebagai langkah penerapan di Sekolah Dasar, 4). Struktur Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini juga dijelaskan pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri di Sekolah Dasar, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi memberikan pilihan pengimplementasian antara lain: Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah dan Implementasi Kurikulum Mandiri Berbagi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan studi literatur dengan menggunakan berbagai jenis sumber artikel ilmiah dari berbagai jurnal untuk mencari teori serta data yang mendukung.

Kata Kunci : Merdeka Belajar, Konsep Merdeka Belajar, Implementasi dan Hasil

ABSTRACT

The aim of this research is to examine 1). The concept of Independent Learning is taken from the opinions of experts taken from relevant references, 2). The Independent Learning Policy launched by the government through the Ministry of Education and Culture, 3). Implementation of the Independent Learning Curriculum as a step in implementing it in Elementary Schools, 4). Independent Learning Curriculum Structure in Elementary Schools. This research also explains the development of the implementation of the Merdeka Mandiri Curriculum in Elementary Schools. The Government through the Ministry of Education, Research and Technology provides implementation options including: Implementation of the Merdeka Mandiri Learning Curriculum, Implementation of the Merdeka Mandiri Curriculum to Change and Implementation of the Mandiri Sharing Curriculum. The method used in writing this article is to use literature study using various types of scientific article sources from various journals to look for theories and supporting data.

Keywords: Freedom to Learn, Concept of Freedom to Learn, Implementation and Results

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program yang baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kebijakan Merdeka belajar Menurut Mas Menteri esensinya adalah kemerdekaan berpikir harus dimulai dari para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam tingkat kompetensi apapun jika seorang guru belum mampu menerjemahkan atau membelajarkan peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ada maka pembelajaran tidak akan pernah terjadi dengan baik atau sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Peluncuran Kebijakan Merdeka belajar oleh Mas Menteri bukanlah tanpa suatu alasan. Melansir dari hasil *Programe for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018 Indonesia berada di urutan ke-74 dari 79 negara (Hewi, 2020). Dari data PISA tersebut dapat kita lihat dan cermati masih rendahnya kemampuan literasi, numerasi dan sains di negara

tercinta. Kemampuan literasi, numerasi dan kemampuan sains tersebut merupakan indikator majunya pendidikan di suatu negara, sehingga dari data tersebut terlihat bahwa sesungguhnya pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata pendidikan dunia. Menurut data penurunan skor PISA terjadi pada tahun 2018. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan sistem, metodologi serta orientasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Kemampuan literasi dan numerasi menjadi salah satu kemampuan yang sangat mendasar di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi Digital (Society 5.0). Pada era revolusi industri 4.0 ditandai dengan teknologi yang berkembang semakin pesat. Sedangkan revolusi Digital (Society 5.0) ditandai dengan lahirnya teknologi digital berdampak masif hidup manusia di seluruh dunia, selain itu juga lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot.

Perkembangan teknologi terutama teknologi digital ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Apabila perkembangan ini tidak mampu kita respon dengan cepat maka sistem pendidikan di Indonesia akan terus tertinggal dan selalu mengalami kemunduran. Ancaman paling besar di era revolusi industri 4.0 dan era revolusi Digital (Society 5.0) adalah setiap individu yang tidak mampu mengikuti dan mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi, maka akan tertinggal bahkan menjadi bagian dari masyarakat yang terbelakang. Di sinilah peran sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan untuk mencetak lulusan berkualitas dengan mengembangkan kurikulum yang dapat mengadopsi dan mengintegrasikan kemajuan teknologi.

Peluncuran merdeka belajar ini semakin tinggi urgensinya dimana kita menjadi bagian dari negara yang termasuk *loss learning* karena munculnya pandemi global yang melanda seluruh dunia yaitu pandemi Covid 19. Kondisi tersebut membuat semua peserta didik harus belajar dari rumah dan keberlangsungan pembelajaran dilakukan secara daring tidak melalui tatap muka (*luring*).

Kegiatan pembelajaran tatap muka yang ditanggihkan di sekolah-sekolah ini telah menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas pendidikan mulai dari pengetahuan (kognitif), keterampilan vokasi (*life skill*), dan keterampilan sosial yang dimiliki siswa akibat *learning loss*. Hal ini dimulai dari pembelajaran dan penyampaian materi yang tidak leluasa sebagaimana pembelajaran *luring*, kesulitan mengajukan pertanyaan ataupun berkonsultasi dengan guru, disebabkan gangguan atau kurang lancarnya sinyal internet. Selain itu, proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru belum menguasai format pembelajaran yang tepat terhadap suatu materi yang disampaikan Sebagian besar sekolah sehingga efektivitasnya masih sering dipertanyakan.

Kebijakan Merdeka belajar yaitu dengan diluncurkannya Kurikulum Merdeka yang merupakan penyempurnaan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya di beberapa sekolah. Esensi dari Kurikulum Merdeka ini adalah sejatinya implementasi program Merdeka Belajar.

Seberapa pentingkah kurikulum sebagai bagian dari kebijakan yang menjadi acuan atau arah pendidikan, oleh karena itu penting untuk mengetahui apa makna dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri sebagaimana dikutip dalam Trisnawati 2022 adalah merupakan seperangkat pelajaran yang diberikan dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Karena itu perangkat pelajaran yang disajikan dalam kurikulum harus mempunyai relevansi dengan yang hendak dicapai.

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain yang mana komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh sub sistemnya.

Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mas Menteri Nadiem Makarim sebenarnya
Copyright (c) 2024 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

menjadi jawaban yang bijak atas keadaan loss learning yang dialami peserta didik, namun demikian dalam pengimplementasian kurikulum merdeka belajar ini, masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dalam pengimplementasiannya membutuhkan proses, waktu, kesiapan, serta kolaborasi dari pemangku kebijakan.

Implementasi Kurikulum Merdeka belajar memang tidak mudah, karena masalah pendidikan kita yang kompleks, disamping itu pendidikan kita masih tertinggal jauh dibanding dengan maju lainnya. Pengimplementasian merdeka belajar ini diharapkan mampu membawa perubahan di dalam sistem pembelajaran khususnya. Pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan peserta didik (kesiapan, minat, profil belajar) atau pembelajaran yang dulunya hanya dilakukan di dalam ruang saja namun sekarang dapat dilakukan senyaman mungkin demi mempermudah proses interaksi antara guru dan siswa. Sistem pembelajaran dalam program merdeka belajar ini didesain sedemikian rupa, sehingga dapat membentuk karakter siswa dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa tanpa harus terbebani dengan standar nilai dan target pencapaian yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan berbagai jenis sumber dari artikel ilmiah dari berbagai jurnal untuk mencari teori dan data-data yang mendukung. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang hanya didasarkan hasil karya tulis ilmiah yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan tidak melakukan penelusuran di lapangan mencari data dan fakta secara langsung.

Dengan demikian walaupun disebut dengan penelitian akan tetapi penelitian dengan metode ini hanya berfokus pada penelitian literatur bersumber pustaka sebagai referensi sesuai dengan penelitaian yang dijalankan. Sumber pustaka yang digunakan antara lain: artikel, buku, dokumen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelusuran pustaka atau *library research* bukan hanya dilakukan pada awal penelitian sebagai landasan teori dan rancangan penelitian, akan tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk mendapatkan data penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah kebijakan yang telah dicanangkan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang sebenarnya bukanlah topik baru yang harus diperdebatkan karena sejatinya merdeka belajar sudah digagas oleh penggiat pendidikan sebelumnya. Merdeka Belajar adalah inovasi dari program unggulan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang dimulai tahun 2019.

Menurut Suyanto dalam Rusman Langke merdeka belajar adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dan guru, sehingga bisa mengembangkan kurikulum secara maksimal atau dengan kata lain guru tidak cenderung mengajarkan yang ditagih kurikulum (A.M.V.D. Pawero, 2017). Artinya guru menjadi kunci dalam menerjemahkan kurikulum. Sedangkan menurut M. Zainudin (pakar pendidikan Universitas Negeri Malang), Kebebasan berpikir bisa berarti peserta didik sesuai potensi yang dimilikinya dalam memahami pembelajaran yang sedang diikuti, meski bebas dalam berpikir namun tetap dalam jangkauan koridor ketercapaian yang telah ditentukan sebab dalam setiap pembelajaran pasti ada yang hendak diraih (Suara pendidikan 2020).

Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan merdeka belajar sebagai sebuah proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan wewenang kepada setiap institusi pendidikan agar terbebas dari administrasi yang berbelit (Widiono, 2021).

Pendapat beberapa pakar tersebut di atas lebih cenderung menerjemahkan bahwa Merdeka Belajar berdasarkan perspektif guru dan perspektif murid yang keduanya merupakan

unsur inti dalam proses pembelajaran. Pada hakikatnya Merdeka Belajar bagi guru adalah kemerdekaan dalam mengartikan dan mengembangkan kurikulum sehingga melahirkan kemerdekaan mengajar. Arti kemerdekaan mengajar sudah barang tentu akan melahirkan kemerdekaan dalam proses belajar bagi peserta didik untuk membentuk karakter yang baik sesuai potensi atau bakat dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing (Kemendikbud, 2020).

Konsep Merdeka Belajar dapat diartikan bahwa pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Konsep ini sebagaimana yang diajarkan bapak pendidikan kita Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia.

Merdeka Belajar berarti guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar bisa dijadikan solusi sebab kebijakan dirancang berdasarkan keinginan dan memprioritaskan kebutuhan siswa. Sebagai cara mengimplementasikan hal ini, Nadiem meminta guru di sekolah untuk merancang metode pembelajaran berbasis proyek untuk memacu kreativitas siswa.

Siswa yang belajar sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi psikologis yang baik diyakini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Kondisi yang menyenangkan atau kondisi psikologis yang baik akan memicu timbulnya perasaan menyenangkan dalam diri anak. Perasaan senang atau psikologis yang baik menjadi dasar penting dalam membangun kecintaan pada belajar. Siswa akan cenderung mau mempelajari semua materi yang ada dan mampu belajar dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Siswa tidak merasa cepat bosan dan tidak mudah berputus asa ketika menghadapi materi yang menantang, ide-ide akan mengalir deras sehingga memunculkan kreativitas. Proses belajar yang dijalani dengan cara menyenangkan memungkinkan siswa mampu untuk mengingat materi lebih banyak dan lebih kuat.

Kebijakan Merdeka Belajar

Empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud 2019; 1-5), yaitu:

1. Ujian Nasional (UN), Kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan digantikan dengan Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK), berbeda dengan Ujian Nasional yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, ANBK dilaksanakan di kelas 4, 8 dan 11. Hasilnya menjadi rujukan satuan pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya (Kemendikbud, 2019: 1).

Adapun instrumen dari ANBK terdiri atas tiga yaitu:

- a. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dirancang untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dalam segi kognitif bidang literasi dan numerasi. Kemampuan siswa berliterasi dan bernumerasi bukan bermaksud mengalihkan kemampuan siswa dalam setiap mata pelajaran akan tetapi dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari bidang ilmu dimulai dari cara berpikir, mencerna informasi dalam bentuk tertulis maupun kuantitatif atau angka-angka. Kemampuan literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca akan tetapi mengukur kemampuan siswa untuk menganalisis bacaan. Sedangkan kemampuan numerasi yang diukur tidak hanya menilai kemampuan siswa pada pelajaran matematika, tetapi mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep numerik dalam keseharian mereka.

- b. Survei Karakter, dirancang untuk mengukur kemampuan siswa pada pencapaian hasil belajar sosial emosional untuk mencetak karakter Profil Pelajar Pancasila: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Berakhlak mulia, Berkebhinekaan Global, Mandiri, Bergotong royong, Bernalar Kritis, dan Kreatif.
 - c. Survei Lingkungan Belajar, dirancang untuk memetakan serta mengevaluasi komponen atau aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diserahkan atau dikembalikan kepada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan dan mengolahnya dengan menentukan penilaian sendiri terhadap siswa melalui proses portofolio, karya tulis atau bentuk penugasan lainnya yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2019: 2).
 3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kebijakan penyederhanaan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa RPP cukup satu lembar tidak perlu berlembar lembar dimaksudkan untuk mengurangi beban administrasi guru dan waktu dapat dialihkan untuk kegiatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi. (Kemendikbud, 2019: 3).
 4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, dalam kebijakan ini diberikan kewenangan secara teknis kepada Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan dalam menentukan daerah zonasi, dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusianya (Kemendikbud, 2019: 4).

Selain kebijakan tersebut di atas, ada empat upaya yang dilakukan Kemendikbudristek bersama masyarakat untuk dikerjakan secara bersama-sama guna memperbaiki dan memajukan pendidikan Indonesia dalam waktu dekat agar dapat mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara maju, yaitu: 1). perbaikan infrastruktur dan teknologi, 2). perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan, 3). perbaikan kepemimpinan, masyarakat dan budaya 4). perbaikan kurikulum, pedagogik, dan asesmen.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Dasar

Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar pemerintah melalui Kemendikbudristek sangat penting mengambil langkah-langkah yaitu pada kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, Program Pendidikan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Program- Program lain yang mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar. Menurut Zaharah (2020: 75) Merdeka belajar memerlukan transformasi kurikulum sekolah ke arah kurikulum sekolah yang terdiversifikasi, yaitu:

- a) Standar nasional disusun oleh pusat untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi standar provinsi dan standar kabupaten/kota, dan standar pendidikan perlu diukur dan diremajakan secara teratur.
- b) Program pendidikan beragam tujuannya, maka pendidikan yang berbasis kepentingan nasional melalui PPKN, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika dan Pendidikan Global akan menjadi alat pemersatu bangsa.
- c) Pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi dasar adalah inti dari kurikulum sekolah menuju berkembangnya kemampuan belajar sepanjang hayat.
- d) Beban pendidikan pengetahuan dasar (mata pelajaran) harus dikurangi sebatas yang diperlukan untuk praktik, dan dilaksanakan melalui pembelajaran tematik.
- e) Sebagian besar konten kurikulum sekolah adalah aplikasi literasi dalam bentuk kecakapan hidup (*life skills*) sesuai dengan kebutuhan wilayah. Pemda perlu diberikan wewenang dan kemampuan untuk menyusun kurikulum tersebut.

f) Sekolah diberikan kewenangan untuk membuat menu pendidikan *life skills* pilihan perorangan dan sekolah harus dapat menjamin penyelenggaraannya.

Perancangan strategi implementasi Kurikulum Merdeka perlu didasari pada pelajaran dari implementasi kurikulum yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain. Perancangan desain kurikulum tidak dapat dipisahkan dari strategi implementasinya. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi implementasi Kurikulum Merdeka dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks yang sistemik. Selain itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum, antara lain sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, fleksibel, selaras, bergotong royong, dan memperhatikan hasil kajian serta umpan balik.

Adapun karakteristik utama Kurikulum Merdeka Belajar sebagaimana dikutip dalam Hattarina, S. dkk, (Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan), yang dapat mendukung pemulihan pembelajaran saat ini, yaitu antara lain:

1) Pembelajaran berbasis proyek (*Project based learning*) untuk pengembangan *soft skills* dan karakter yang meliputi iman, taqwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebhinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas.

2) Fokus pada materi-materi esensial yang diharapkan dapat memberikan waktu cukup untuk pembelajaran secara mendalam pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.

3) Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa (*teaching at the right level*) dan juga melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Kurikulum mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran yang hilang *learning loss* yang disebabkan pandemi covid 19. Diantara dua tujuan yang mendasari kebijakan Kurikulum Merdeka dijadikan pilihan bukan kewajiban bagi sekolah sebagaimana dikutip dalam Mulyono, R., dkk. (2022) (Implementasi Kurikulum Merdeka Sebagai Sebuah Pilihan Bagi Satuan Pendidikan). *Pertama*, pemerintah dalam hal ini kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. *Kedua*, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat secara lancar dan bertahap.

Opsi bagi sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri dapat memilih tiga pilihan lagi yaitu:

1. Mandiri Belajar, Sekolah yang memilih Mandiri Belajar masih menggunakan Kurikulum 2013 tapi sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang ada di Kurikulum Merdeka, terutama dalam rangka peningkatan kompetensi literasi, numerasi, penguatan pendidikan karakter dan lainnya yang ada di Kurikulum Merdeka.
2. Mandiri Berubah, Sekolah sudah memanfaatkan sepenuhnya platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Memilih CP, TP, ATP, perangkat ajar, Assesmen, dan lainnya di platform ini yang telah memuat kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
3. Mandiri Berbagi, diperuntukan bagi sekolah yang sudah melaksanakan praktik terkait pengembangan bahan ajar, mempunyai karya dan berinovasi serta bersedia berbagi kepada sekolah-sekolah lain.

Struktur Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar

Kurikulum Merdeka Belajar juga mempunyai ciri-ciri berikut:

Profil Pelajar Pancasila (PPP) menjadi acuan dalam pengembangan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, atau Struktur Kurikulum, Capaian Pembelajaran (CP), Prinsip Pembelajaran, dan Asesmen Pembelajaran.



Struktur Kurikulum SD/MI	
Struktur Kurikulum SD/MI	Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu: a. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Jam Pelajaran (JP)	Jam Pelajaran (JP) diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan.
Pendekatan Pembelajaran	Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi.
Perubahan Terkait Mata Pelajaran	a. Mata pelajaran IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial) merupakan paduan dari IPA dan IPS. b. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, tergantung kesiapan satuan pendidikan. c. Satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya 1 dari 4 mata pelajaran Seni dan Budaya: Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari.

Gambar 1. Struktur Kurikulum SD/MI

Capaian Pembelajaran (CP)

Pada Kurikulum 2013 terdapat istilah KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pada Kurikulum Paradigma Baru atau kurikulum merdeka belajar, istilah yang digunakan adalah Capaian Pembelajaran (CP). Capaian Pembelajaran (CP) adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase (*salinan keputusan kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek no 033/H/KR/2022*). Capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan pembaruan dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi (Amiruddin & Irfan, 2020). Skema untuk implementasi Capaian Pembelajaran sebagaimana dikutip dalam dalam Hattarina, S. dkk, (Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan) dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. Capaian Pembelajaran

Alur Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran selanjutnya dijabarkan atau disederhanakan menjadi TP (Tujuan Pembelajaran). Tujuan pembelajaran untuk menyederhanakan Capaian Pembelajaran agar pembelajaran yang dirancang guru terlaksana sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang sudah disusun ini menjadi acuan dalam proses pembelajaran ini disebut Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran SD selama kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik di Kurikulum Merdeka Sekolah menyelenggarakan pembelajaran dengan berbasis pada mata pelajaran.

Jumlah Jam Pelajaran

Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, Kurikulum Merdeka Belajar tidak menetapkan Copyright (c) 2024 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

jumlah jam pelajaran perminggu seperti yang selama ini berlaku pada kurikulum 2013. Pada Kurikulum Merdeka, jumlah jam pelajaran ditetapkan pertahun. Hal ini membuat setiap sekolah diberi kemudahan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Dengan demikian suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester satu namun diberikan pada semester dua berlaku sebaliknya.

Model Pembelajaran Kolaboratif

Pada Kurikulum Merdeka, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Salah satu contohnya adalah asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada Kurikulum Merdeka siswa Sekolah Dasar paling sedikit dapat melakukan dua kali penilaian proyek dalam satu tahun pelajaran.

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAS)

Mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang Sekolah Dasar Kelas IV, V, dan VI berdiri sendiri. Dalam Kurikulum Merdeka, kedua mata pelajaran tersebut akan diajarkan secara bersamaan dengan nama Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAS), Tujuannya adalah siswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP.

KESIMPULAN

Kebijakan Merdeka Belajar adalah langkah pemerintah melalui Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi learning loss yang dialami selama pandemi covid 19. Merdeka Belajar bermakna Kemerdekaan Belajar, yakni memberikan guru dan murid kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar berpedoman pada Profil Pelajar Pancasila, 1).Beriman, bertaqwa, kepada tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2). Mandiri, 3). Bergotong-royong, 4). Berkebinekaan global, 5). Bernalar kritis, 6). Kreatif.

Kurikulum merdeka belajar merupakan salah satu konsep kurikulum yang menuntut kemerdekaan pendidik dalam membelajarkan peserta didik. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum merdeka melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri memberikan kewenangan bagi sekolah untuk memilih opsi antara lain: Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi.

Penerapan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mas Menteri dengan berbagai cara pengembangannya sampai saat ini sudah dapat berjalan dengan baik terutama di tingkat Sekolah Dasar, namun demikian perlu peningkatan pengembangan kebijakan yang dapat membantu para pendidik sebagai ujuk tombak pelaksanaannya dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang penerapan kurikulum merdeka khususnya dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hattarina, S., Pratama, H., & Supraptiningsih, L. K. (2020). Kegiatan membaca lebih unggul daripada menonton dalam melatih keterampilan berpikir kritis anak. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 394-401.
- Hattarina, S., Saila, N., Faradilla, A., Putri, D. R., & Putri, R. G. A. (2022, August). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. In *Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 181-192).
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52-75.

- Kemendikbud. (2019). “Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar”. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
- Kemendikbud. (2019). “Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar”. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
- Kurniawan, A. IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SD NEGERI CANGKOL 02 SUKOHARJO.
- Langke, R. (2021). Implementasi merdeka belajar di Madrasah. *Journal of Islamic Education Leadership*, 1(2), 125-135.
- Mulyono, R., & Sulistyani, F. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Sebagai Sebuah Pilihan Bagi Satuan Pendidikan: Kajian Pustaka. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 1999-2019.
- Munawar, M. (2022). Merdeka Belajar. *JURNAL PEDAGOGY*, 15(2), 137-149.
- Oktiani, I. (2017). Kreativitas guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. *Jurnal kependidikan*, 5(2), 216-232.
- Oscarina,DK.,Lutfiah,S.(2022). Praktik Pembelajaran yang berpihak kepada Murid: *Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2022*
- Rezky, M. P., Sutarto, J., Prihatin, T., Yulianto, A., & Haidar, I. (2019). Generasi milenial yang siap menghadapi era revolusi digital (society 5.0 dan revolusi industri 4.0) di bidang pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1117-1125).
- Rindayati, E., Putri, C. A. D., & Damariswara, R. (2022). Kesulitan calon pendidik dalam mengembangkan perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 3(1), 18-27
- Taridala, S., & Anwar, R. (2023). *TRANSFORMASI EDUKASI: Mengoptimalkan Kinerja Guru dan Kualitas Layanan Melalui Program Merdeka Belajar*. Feniks Muda Sejahtera